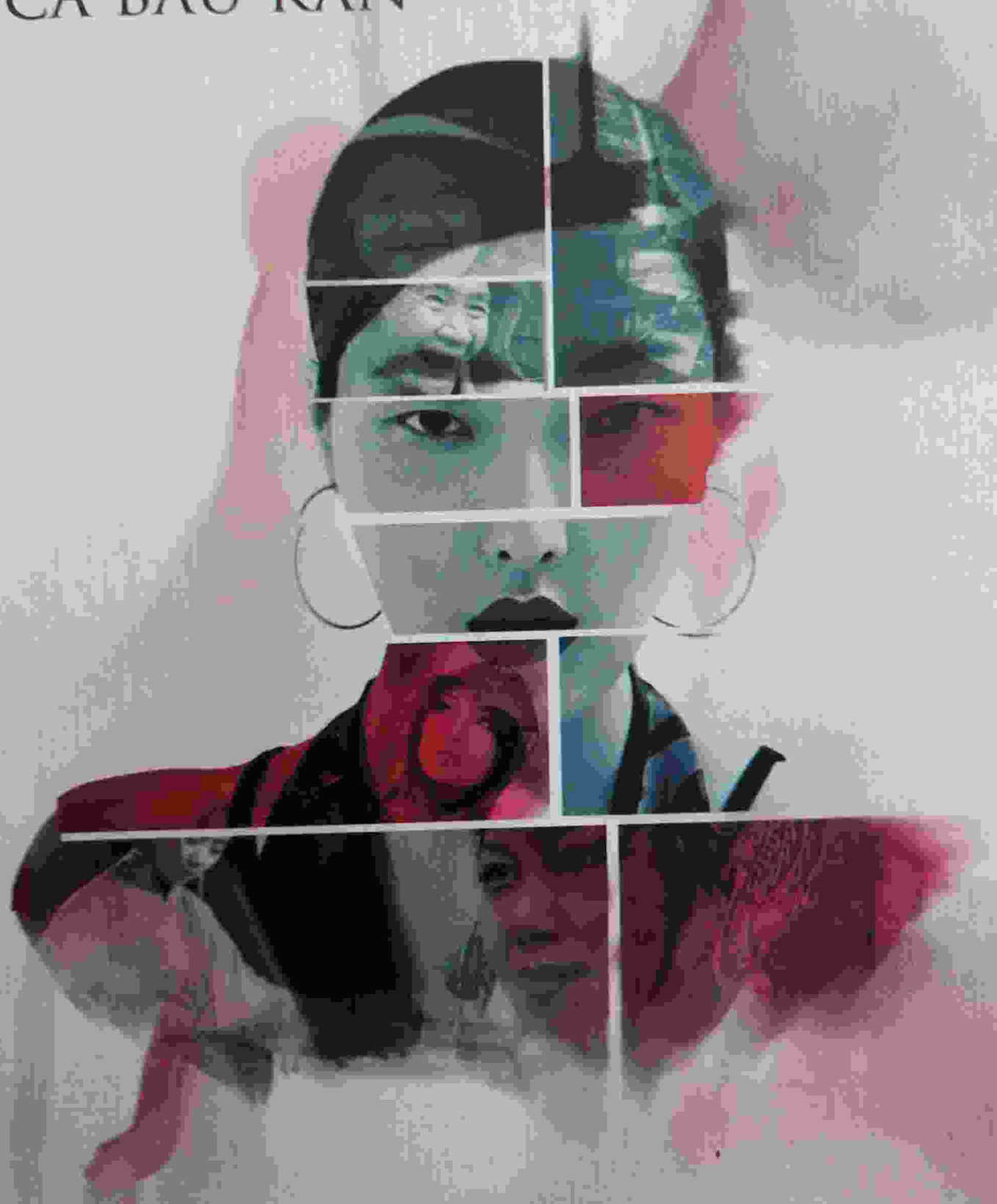


# TIONGHOA

DALAM NOVEL  
CA-BAU-KAN



Sainul Hermawan  
Pengantar Prof. Dr. Faruk HT

**TIONGHOA DALAM NOVEL CA-BAU-KAN**

**Penulis: Sainul Hermawan**

**Penyunting: Yetti A.KA**

**Pemeriksa Aksara: Daruz Armedian**

**Tata Sampul: Airawan Ratra**

**Tata Isi: Kayla**

**Pracetak: Kiki**

**Cetakan Pertama, April 2018**

**Penerbit**

**BASABASI**

**Jl. Malabar No. 16, Sorowajan Baru,  
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta 55198**

**Telp: (0274) 484360**

**HP: 087808058023 dan 081316320671**

**Email: basabasistore@gmail.com**

**LINE: @zog5070k**

**Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

**Hermawan, Sainul**

***Tionghoa dalam Novel Ca-bau-kan/Sainul Hermawan; penyunting, Yetti A.KA-***  
**cet. 1-Yogyakarta: BASABASI, 2018**

**256 hlmn; 14 x 20 cm**

**ISBN 978-602-5783-03-6**

**I. Esai**

**II. Yetti A.KA**

**I. Judul**

## UNGKAPAN TERIMA KASIH

Buku ini adalah hasil penelitian yang saya lakukan sepanjang tahun 2000-2003 dan telah berhasil dipertanggungjawabkan dengan baik di hadapan dewan penguji tesis Program Studi Sastra Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 7 Januari 2003. Dalam format tesis yang baku dan kaku, hasil penelitian itu berjudul *Konstruksi Tionghoa dalam Novel Ca-bau-kan Karya Remy Sylado: Analisis Wacana Foucaultian*. Ircisod telah membantu penerbitannya untuk pertama kali pada tahun 2005 dengan judul *Tionghoa dalam Sastra Indonesia*. Beberapa pembaca keberatan dengan judul tersebut sehingga saya mempertimbangkan judul baru ini: *Tionghoa dalam Novel Ca-bau-kan, Perspektif*

*Foucaultian*. Menurut mereka, judul sebelumnya bisa "menyesatkan" anggapan pembaca karena mereka bisa mengira akan membaca buku tentang Tionghoa dalam beragam genre sastra di Indonesia. Padahal, buku ini hanya mendiskusikan Tionghoa dalam sebuah novel. Hanya itulah perubahan yang diperlukan oleh edisi ini.

Terwujudnya buku ini tidak dapat dipisahkan dari partisipasi banyak pihak. Kepada mereka saya sangat berutang budi dan, oleh karena itu, ingin menyampaikan ungkapan terima kasih. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada Prof. Dr. Faruk, sebagai dosen pembimbing, yang telah memberikan kontribusi yang sangat berarti melalui kritik-kritik tajamnya terhadap rancangan awal penelitian saya dan berkenan menulis kata pengantar untuk buku ini. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Prof. Dr. Rachmat Djoko Pradopo, Prof. Dr. Siti Chamamah Soeratno, dan almarhum Dr. Imran T. Abdullah, yang telah meluangkan waktu untuk membaca buku ini dan mengoreksi bagian-bagian tertentu yang masih kurang sempurna. Saya sangat menghargai jasa mereka yang telah menyumbangkan tenaga, waktu, dan keahlian untuk menanggapi buku ini.

Buku ini adalah juga sebetulnya ungkapan terima kasih kepada ibu, bapak, adik, mertua, istri, dan anak saya

yang dengan cara mereka masing-masing menunjang penyelesaiannya.

Keinginan untuk menerbitkan buku ini juga tak lepas dari peran mahasiswa saya di kelas Kritik Sastra, Sosiologi Sastra, Penelitian Sastra, dan Teori Sastra di FKIP Universitas Islam Malang, Jawa Timur (2002-2004) dan FKIP Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan (sejak 2005), yang senantiasa memberikan inspirasi berharga melalui pertanyaan-pertanyaan tajam mereka yang sebagian jawabannya ada dalam buku ini. Akhirnya, saya hanya berharap buku ini dapat memberikan arti bagi perkembangan dan pengembangan ilmu sastra. Semoga.

Banjarmasin, 08 Januari 2018

Sainul Hermawan

# DAFTAR ISI

|   |          |
|---|----------|
| UNGKAPAN TERIMA KASIH .....                     | 3        |
| DAFTAR ISI .....                                | 7        |
| <b>ETNIS TIONGHOA DAN PERSOALAN PLURALISME</b>  |          |
| <b>DI INDONESIA Pengantar Dr. Faruk .....</b>   | <b>9</b> |
| 1 Reformasi, Tionghoa, dan Sastra .....         | 19       |
| Bingkai Teoretis .....                          | 36       |
| Foucault, Wacana, dan Sastra .....              | 38       |
| Sistematika Buku Ini .....                      | 51       |
| 2 Konstruksi Tionghoa dalam Wacana-Wacana ..... | 55       |
| Wacana Ke-WNI-an Tionghoa .....                 | 58       |
| Wacana Ekonomi Tionghoa .....                   | 70       |
| Wacana Istilah Tionghoa/Cina .....              | 82       |

|          |   |            |
|----------|---|------------|
| <b>3</b> | <b>Konfigurasi Tionghoa dalam Ca-bau-kan</b>  |            |
|          | Deskripsi Etnografis .....                    | 87         |
|          | <i>Bahasa</i> .....                           | 91         |
|          | <i>Sistem Mata Pencabarian</i> .....          | 107        |
|          | <i>Organisasi Sosial</i> .....                | 123        |
|          | <i>Sistem Religi</i> .....                    | 160        |
|          | <i>Sistem Pengetahuan</i> .....               | 175        |
|          | <i>Kesenian</i> .....                         | 179        |
|          | Etnografi, Inklusi, Eksklusi, Sirkulasi ..... | 185        |
|          | Ambivalensi Wacana Pembelaan .....            | 192        |
| <b>4</b> | <b>Kesimpulan</b> .....                       | <b>203</b> |
|          | <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....                   | <b>207</b> |
|          | <b>LAMPIRAN</b> .....                         | <b>221</b> |
|          | <b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....                 | <b>229</b> |
|          | <b>TENTANG PENULIS</b> .....                  | <b>245</b> |
|          | <b>INDEKS</b> .....                           | <b>247</b> |

# **ETNIS TIONGHOA DAN PERSOALAN PLURALISME DI INDONESIA**

**Pengantar Dr. Faruk  
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta**

Indonesia merupakan masyarakat-bangsa yang sangat heterogen, baik dari segi agama, kebudayaan, maupun etnisitas. Heterogenitas yang demikian sesungguhnya merupakan peluang baginya untuk mengembangkan sebuah sistem sosio-kultural yang sangat kaya, plural, dan bahkan multikultural, yang pada gilirannya memberikan kepadanya banyak modal untuk dapat beradaptasi dengan baik dengan segala kemungkinan perubahan yang terjadi akibat semakin ekstensif dan intensifnya persentuhan masyarakat tersebut dengan berbagai kekuatan sosial, kultural, ekonomi, dan politik yang datang dari luar sebagaimana yang antara lain dan



terutama dimungkinkan oleh globalisasi ekonomi dan informasi. Dengan pengalaman sejarah yang panjang dalam lingkungan pergaulan sosio-kultural yang heterogen itu, masyarakat-bangsa Indonesia itu pastilah akan menjadi sangat terampil dalam melakukan adaptasi terhadap berbagai kemungkinan perubahan di atas.

Potensi yang demikian sebenarnya sudah sejak lama disadari oleh kelompok elit intelektual dan politiknya. Kesadaran itu tidak hanya ada dalam pikiran mereka yang samar-samar, melainkan juga sudah dibakukan dalam rumusan yang mempunyai kekuatan politik dan legal, yaitu dalam aturan-aturan dan perundang-undangan negara yang sah dan berkekuatan hukum seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun demikian harus pula diakui bahwa apa yang dinyatakan secara politis-legal-formal itu ternyata tidak selalu berhasil diwujudkan menjadi kenyataan, tidak sepenuhnya berhasil menjadi pemandu bagi berbagai praktik kehidupan keseharian dari masyarakat sipil yang bersangkutan dan bahkan bagi berbagai praktik politik-ekonomi yang makro. Intoleransi dan diskriminasi banyak mewarnai interaksi sosial, kultural, dan bahkan ekonomi antarkelompok masyarakat, baik kelompok etnis maupun agama. Kecenderungan yang sama, dalam batas tertentu, terjadi juga dalam banyak kebijakan negara mengenai hubungan antaretnis dan agama di atas.

Setidaknya ada tiga faktor yang memungkinkan terjadinya kecenderungan yang terakhir itu, yakni faktor demografis, historis-politis, dan faktor kultural. Faktor yang pertama menyangkut kenyataan bahwa komposisi kelompok-kelompok etnis dan agama dalam masyarakat-bangsa Indonesia sangat timpang. Di satu pihak ada kelompok etnis dan agama dengan jumlah anggota yang amat besar, mencapai lebih dari separuh dari keseluruhan populasi penduduk Indonesia, sedangkan di lain pihak ada yang hanya terdiri dari tidak lebih dari 1% populasi tersebut. Dengan komposisi yang demikian kemungkinan dominasi satu kelompok atas kelompok yang lain menjadi sulit untuk dielakkan.

Faktor yang kedua, pertama-tama dan terutama, terkait dengan kebijakan politik pemerintah kolonial Belanda, yaitu kebijakan politik yang secara kasar dikenal sebagai politik *divide et impera* (memecah belah untuk menguasai). Untuk menghindari kemungkinan terbentuknya kekuatan politik yang besar dari masyarakat terjajah, pemerintah kolonial tersebut memberlakukan berbagai macam peraturan yang membuat terisolasinya kelompok etnis dan agama yang satu dari kelompok etnis dan agama yang lainnya. Berbagai peraturan itu antara lain berupa penempatan etnis minoritas dalam wilayah geografis tertentu dan penentuan kewajiban

bagi masyarakat setempat untuk menggunakan pakaian daerahnya masing-masing.

Faktor kultural menyangkut tidak adanya teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat tersebut mengonstruksi sebuah bangunan sosio-kultural dengan jangkauan yang luas dan dengan tingkat kompleksitas yang tinggi. Sebagian besar masyarakat etnis Indonesia hidup dalam lingkungan komunitas tribal yang sederhana dan dengan cakupan wilayah yang relatif sempit. Beberapa masyarakat etnis memang mempunyai populasi yang relatif besar dengan jangkauan wilayah geografis yang relatif luas dan bahkan mempunyai sistem politik yang relatif rumit, yang melampaui batas-batas tribalisme, yaitu sistem kerajaan yang sentralistik, tetapi, karena tidak tersedianya teknologi informasi yang sesuai, masyarakat-masyarakat lokal atau pedesaan dan bahkan perkotaan yang letaknya jauh dari pusat kekuasaan tetap menjalankan sistem sosio-kultural setempat yang cenderung tribal. Kekuasaan pusat hanya memancar secara simbolik dengan sosok yang samar-samar, berkabut, antara ada dan tiada.

Dengan kondisi yang demikian peta kognitif dan afektif mereka cenderung amat terbatas dan sederhana, tidak dapat menampung keanekaragaman yang begitu kaya dengan kemungkinan sistem relasi yang begitu

rumit. Teknologi informasi yang berupa bahasa lisan, yang dapat dikatakan sebagai satu-satunya teknologi yang mereka miliki atau setidaknya yang secara intensif mereka gunakan mempunyai persoalan dalam *storing* informasi sehingga hanya hal-hal yang amat terbatas, sederhana, relatif homogen, yang dapat ia simpan dan olah. Memang, beberapa masyarakat etnis itu mempunyai tulisan, tetapi tulisan itu pun digunakan dalam lingkungan elite yang amat terbatas dan untuk keperluan yang juga amat terbatas, yang jauh dari praktik kehidupan keseharian, dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat. Ketidakmampuan inilah yang membuat kebanyakan dari masyarakat etnis itu cenderung memahami orang asing, benda asing, relasi-relasi yang asing, sebagai sesuatu yang abnormal dan bahkan kadang-kadang sebagai sesuatu yang mengancam eksistensi mereka, misalnya mereka bayangkan sebagai raksasa seperti yang terdapat dalam masyarakat dan kebudayaan Jawa. Selain itu, hal yang paling umum bagi mereka tentu saja adalah kecenderungan untuk melakukan stereotifikasi terhadap masyarakat dan kebudayaan baik dari kelompok etnis maupun kelompok keagamaan yang lain.

Teknologi lainnya yang menutup kemungkinan terbentuknya masyarakat dan kebudayaan yang plural dan multikultural itu adalah teknologi transportasi. Karena lemahnya ketersediaan teknologi yang demikian, interaksi

antarberbagai kelompok masyarakat yang heterogen di atas tidak dapat berlangsung dengan intensitas dan ekstensitas yang tinggi. Kecenderungan ini, pada gilirannya, memperlemah kemungkinan mengendapnya suatu cara pandang, cara bersikap, dan berperilaku yang toleran terhadap perbedaan dan siap menghadapi kemungkinan perubahan yang cepat.

Dalam kondisi seperti di atas semua kelompok masyarakat akan cenderung mengalami kesulitan untuk dapat saling memahami, untuk dapat saling menerima perbedaan, dan untuk tidak bersikap diskriminatif satu sama lain. Persatuan, dalam situasi yang demikian, lebih banyak dibangun oleh dominasi satu kelompok atas kelompok yang lain, misalnya mayoritas atas minoritas dalam situasi ketika masyarakat sipil lebih kuat daripada negara dan dominasi minoritas atas mayoritas dalam situasi ketika negara lebih kuat dari masyarakat sipil karena negara menguasai alat-alat kekerasan dan/atau militeristik yang pada gilirannya bahkan menguasai sumber-sumber ekonomi.

Indonesia terus-menerus berada dalam tarik-menarik antara dua situasi di atas sehingga peluang bagi terbentuknya masyarakat plural dan multikultural menjadi sangat kecil. Pada masa kolonial negara berada dalam posisi yang sangat kuat sehingga komunitas orang-

orang Belanda dan/atau Eropa yang dari segi populasi berada dalam posisi minoritas justru menjadi kelompok yang sangat berkuasa. Dengan atau tanpa dukungan para ilmuwan orientalis kelompok inilah yang menentukan konstruksi identitas kelompok-kelompok masyarakat lainnya di Indonesia, kelompok masyarakat yang berbeda dengannya baik dari segi rasial/etnis maupun dari segi keagamaan. Begitu hegemoniknya penguasa kolonial ini sehingga kekuasaan kulturalnya terus bergaung bahkan hingga masa-masa pascakolonial, terutama sebagaimana yang secara ekstrem terjadi pada masa Orde Baru awal di mana negara menempati posisi yang amat kuat.

Sebaliknya, segera setelah tumbangannya kekuasaan pemerintah kolonial Belanda dan terbangunnya kekuasaan pemerintah kolonial Jepang hingga masa-masa awal kemerdekaan Indonesia, masyarakat sipil mempunyai kedudukan yang sangat kuat sehingga mayoritas etnis ataupun keagamaan menjadi sangat dominan, baik secara politik maupun kultural. Pada masa ini terjadi pemarginalan, pembungkaman, dan bahkan serangkaian tindakan kekerasan terhadap minoritas seperti perebutan terhadap perusahaan-perusahaan orang Belanda, pembunuhan dan pengusiran terhadap mereka, dan sebagainya.

Dalam tarik-menarik seperti di atas kelompok etnis Tionghoa menempati posisi yang khas, unik, dengan problematika yang relatif kompleks. Kelompok masyarakat ini merupakan minoritas pendatang yang membuat posisinya serupa dengan kelompok masyarakat Arab, India, dan Eropa. Namun, mereka tidak pernah menduduki posisi politik yang dominan sebagaimana orang-orang Eropa dan tidak menganut agama yang sama dengan agama mayoritas sebagaimana orang-orang Arab dan India. Dalam posisi yang demikian mereka menjadi kelompok yang selalu terombang-ambing di dalam kedua situasi yang dikemukakan di atas, baik pada situasi ketika negara sangat kuat maupun pada situasi ketika masyarakat sipil yang kuat.

Posisi yang seperti itu, pada gilirannya, membuat mereka terhabituasi untuk mengonsentrasikan perjuangan hidup pada sektor non-politik, yaitu ekonomi dengan hasil yang benar-benar maksimal di satu pihak, dan mengonsentrasikan resistensi mereka pada penguatan solidaritas ke dalam dengan cara memperkuat ikatan etnis dan kekerabatan di antara mereka sendiri dan menutup diri dari kemungkinan ekspansi kelompok masyarakat yang lain ke dalamnya. Kalaupun dengan modal ekonomi yang kuat mereka juga melakukan gerakan-gerakan politik yang signifikan, gerakan-gerakan itu cenderung mereka lakukan di belakang layar sehingga tidak mem-

punyai pengaruh yang signifikan secara kultural. Mereka cenderung menjadi kekuatan politik tanpa bentuk sehingga mudah sekali dijadikan kambing hitam baik oleh negara maupun oleh masyarakat sipil, baik oleh minoritas yang berkuasa maupun oleh mayoritas. Pada masa awal Orde Baru, ketika kelompok minoritas keagamaan berkuasa, negara melakukan diskriminasi kultural yang luar biasa, yaitu dengan melarang penggunaan segala simbol identitas masyarakat Tionghoa sekaligus memberikan peluang ekonomi yang sangat besar pada mereka untuk kepentingan penguasa Orde Baru sendiri. Namun, pada masa-masa akhir Orde Baru, ketika mayoritas keagamaan berkuasa, mereka menjadi kambing hitam bagi kejatuhan ekonomi Indonesia dan mengalami tindakan kekerasan yang sangat mengerikan.

\*\*\*

Posisi yang terus mengambang, tanpa bentuk, dalam tarik-menarik di atas itulah yang pada gilirannya membuat pengetahuan masyarakat Indonesia pada umumnya mengenai seluk-beluk kehidupan orang-orang Tionghoa menjadi sangat minim kalau tidak dapat dikatakan nihil. Kelompok-kelompok masyarakat yang lain hanya mengenali mereka secara stereotipikal, serangkaian stereotipe yang terbentuk hanya dari interaksi dan



pengamatan mereka di wilayah publik, terutama “pasar”. Karena, untuk resistensi ke dalam, sebagaimana yang sudah dikemukakan, orang-orang Tionghoa sendiri hampir tidak pernah bercerita mengenai diri mereka sendiri, informasi yang lebih mendalam mengenai mereka terpaksa tetap hanya dapat diperoleh dari penuturan orang lain.

Novel Remy Silado yang dibahas di dalam buku ini menjadi karya yang amat berharga karenanya. Dengan karya Remy itu kelompok-kelompok masyarakat lain akan dapat mengenal kelompok etnis Tionghoa dari jarak yang lebih dekat. Namun, karena penuturnya bukanlah orang Tionghoa sendiri, tidak tertutup kemungkinan terjadinya bias stereotipikal dalam penuturan novel tersebut. Itulah sebabnya, penuturan Remy itu pun perlu dibaca dengan kritis. Dan pembacaan kritis itulah yang dilakukan oleh buku karya Sainul Hermawan ini.

Jogjakarta, 06 Agustus 2005